

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Deli Serdang tahun 2024 akan dilaksanakan pada bulan 27 November 2024. Diharapkan PIMILUKADA yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia ini mendapat partisipasi dari pemilih jauh lebih tinggi dari PIMILUKADA Deli Serdang sebelumnya. Bahwa akibat rendahnya partisipasi pemilih pada PIMILUKADA selama ini berdampak negatif terhadap keterpilihan pemimpin. Pemimpin terpilih dinilai kurang legitimasi atau cenderung tidak mewakili kelompok pemilih yang sesungguhnya. Dimana PIMILUKADA seharusnya dilakukan untuk membuka peluang selebar-lebarnya bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya agar demokrasi dilaksanakan dengan jujur dan adil tapi kenyataannya banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Mencermati kenyataan itu, KPU Deli Serdang sebagai penyelenggara PEMILUKADA harus aktif dalam memainkan peran agar partisipasi pemilih khusus pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 86.418 meningkat dalam PIMILUKADA tahun 2024 ini di bandingkan dengan DPT Pemilu 2019.

Berbagi pendapat bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada setiap PIMILUKADA tidak terlepas dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dinilai sangat rendah karena partai politik gagal menghadirkan calon kepala daerah sesuai keinginan rakyat. Kemudian kepercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara PIMILUKADA sangat rendah oleh karena rakyat cenderung tidak percaya terhadap KPU yang terbiasa tidak profesional, netral dan seringkali berpihak kepada calon kepala daerah tertentu. Selain itu masih kerangnya sosialisasi tahapan pemilihan misalnya banyaknya rakyat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian juga partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan selama ini juga gagal menjalankan pendidikan politik kepada rakyat.

Rakyat hanya diperhatikan saat-saat tertentu khusus pada saat pemilu. Alhasil pada PIMILUKADA rakyat tidak mengerti makna sesungguhnya dari PIMILUKADA, sehingga perilaku *money* politik terjadi di setiap PIMILUKADA bahkan sudah bukan rahasia umum bahwa kepala daerah yang terpilih oleh karena *money* politik atas juga disebut serangan fajar.

Jika melihat angka golput yang terjadi pada PEMILUKADA Deli Serdang 2024 dengan PILWALKOT Medan 2024 sama-sama mengalami kenaikan. Pada PILWALKOT Medan angka golput naik sekitar menjadi 53,2 persen kenaikan ini disebabkan karena faktor alam seperti curah hujan deras yang menyebabkan banjir di beberapa titik Kota Medan. Hal ini menghambat masyarakat untuk datang ke TPS.

Seperti data pemilih dari jumlah pemilih tetap salah satu Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang pada PEMILUKADA 2024 yaitu Kecamatan Tanjung Morawa yang memiliki DPT 167.104 dari jumlah DPT tersebut hanya sekitar 59.256 yang berpartisipasi dalam PILKADA Deli Serdang 2024 dengan rincian suara sah 57.474 dan suara tidak sah 1.782. sehingga da sekitar 107.848 jiwa yang tidak berpartisipasi dalam PILKADA 2024 Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini menjadi parameter strategi yang telah diterapkan oleh KPU Kota Deli Serdang untuk menurunkan angka golput pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan. Penelitian itu bertujuan untuk (1) menganalisa strategi dan penerapan strategi KPU Deli Serdang pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam mengurangi angka golput, (2) menganalisa strategi dan penerapan strategi KPU Deli Serdang pada tahapan sosialisasi pemilihan dalam mengurangi angka golput tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang untuk mengantisipasi tingginya golput pada PIMILUKADA tahun 2024 ini. Karena ada kecenderungan PIMILUKADA Deli Serdang berpotensi banyaknya golput maka penulis tertarik untuk meneliti tentang STRATEGI KPU DELI SERDANG DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PEMILUKADA SERENTAK 2024

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas yaitu:

Strategi apa yang di pakai KPU Deli Serdang dalam Pemilukada serentak 2024 ini dalam upaya menekan angka golput?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk Menganalisis efektivitas strategi KPU. Menilai sejauh mana strategi yang telah di implementasikan oleh KPU Deli Serdang dapat berhasil menekan angka golput pada pemilihan umum terakhir, dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih

1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk pemilihan umun selanjutnya, berikut beberapa manfaat dari penelitian yang di maksud :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi serta informasi tertulis mengenai strategi yang efektif untuk menekan angka golput di wilayah kerja KPU Deli Serdang.

2. Secara Praktis

a. Untuk KPU Deli Serdang

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi KPU deli Serdang dalam penentuan strategi untuk pemilukada berikutnya tentang penekanan angka golput.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan masyarakat sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk menggunakan hak pilih nya pada pemilu berikutnya.

c. Untuk Peneliti

Manfaat yang didapatkan peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru tentang pemilu dan sebab akibat golput yang tinggi. Serta penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di lingkungan FISIP UISU.

d. Bagi FISIP UISU

Penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat dan meningkatkan akreditasi dan reputasi Fakultas melalui hasil penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Penelitian

Teori penelitian merupakan uraian sistematis mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang di teliti. Teori berisi tentang penjelasan terhadap variable yang di teliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi hingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variable yang akan di teliti, menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian.¹

Teori penelitian ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa, menjelaskan serta memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015). Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada PEMILUKADA, Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi PEMILUKADA kepada masyarakat. Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi.

¹ Anggaran, sahya (2015) *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV Pustaka Setia, 60.

Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai².

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif³.

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi:

Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah⁴.

² Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal: 153-157

³ Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi, 2000) hal: 17

⁴ Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996) hal: 19

Menurut Konichi Ohinea strategi bisnis adalah keunggulan bersaing satu-satunya maksud perencanaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Jadi, strategi perusahaan merupakan upaya mengubah kekuatan perusahaan yang sebanding dengan kekuatan pesaing-pesaingnya, dengan cara yang paling efisien.

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals)⁵.

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain⁶.

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci⁷.

Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemenelemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu, suatu organisasi harus mampu berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan dengan keadaan lingkungan yang ada.

⁵ Pandji Anoraga. Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal:339

⁶ Setyo Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank, (Jakarta:Ikral Mandiri Abadi,1994), hal: 17

⁷ Philip Kotler. Marketing Management, (Jakarta: Pren Hallindo,1997), hal: 8

Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi harus mampu berkembang untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada di lingkungannya, di mana strategi harus mampu meresponi organisasi terhadap pilihan kebijakan yang akan diambil. Itu sebabnya suatu strategi mempunyai skema untuk mencapai sasaran apa yang akan dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Supriatna, 2018:34-35).

Sebagaimana yang dikutip oleh Supriatna dari Marrus, Marrus mendefinisikan bahwa strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Maka dari itu, definisi yang disebutkan oleh Marrus dapat dikatakan strategi sebagai cara untuk menentukan sebuah rencana yang dilakukan oleh pemimpin puncak tertinggi. Perancangan strategi tersebut dibuat dengan agar perusahaan atau instansi tersebut dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya (Marrus, 2002:31).

Strategi yang diutarakan oleh Kaplan dan Norton adalah “Strategi mendeskripsikan bagaimana perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, pelanggan dan masyarakat. Strategi bukanlah proses manajemen yang berdiri sendiri, ini adalah salah satu langkah dalam sebuah kontinum yang logis yang menggerakkan organisasi dari pernyataan misi tingkat tinggi untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan baris depan dan belakang kantor.

Strategi dikembangkan dan berevolusi dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kondisi yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan kemampuan internal. Adapun beberapa indikator strategi menurut Kaplan dan Norton, di antaranya adalah:

1. Strategi menyeimbangkan kekuatan yang bertentangan (*Strength*)
2. Strategi didasarkan pada proposisi nilai pelanggan yang berbeda (*Values*)
3. Nilai diciptakan melalui proses bisnis internal (*Progress*)
4. Strategi terdiri dari tema yang melingkupi secara bersamaan (*Theme*)
5. Keselarasan strategis menentukan nilai aset tak berwujud (*Harmony*)

Menurut (Kaplan & Norton, 2004:4-32) Strategi yang diutarakan oleh Kaplan dan Norton di atas, berbicara tentang bagaimana suatu perusahaan membuat added values untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada suatu perusahaan. Karena pada dasarnya strategi tidak dapat berdiri sendiri, strategi dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengarahkan para karyawan untuk dapat merubah suatu kondisi suatu perusahaan yang sesuai dengan kemampuan di internal perusahaan tersebut.

Ada juga Geoff Mulgan yang menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Mulgan, 2009:19).

Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran). Jika peneliti perhatikan dari kelima komponen yang diutarakan oleh Mulgan, semua komponen tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yang tidak lain untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan.

Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan. Dari teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan di atas, Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya, di antaranya adalah *power* (kekuasaan) dan *knowledge* (ilmu pengetahuan).

Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk menggunakan teori dan komponen yang diutarakan oleh Geoff Mulgan. di mana dari teori dan kelima komponen di atas, memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, peneliti memiliki beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:

1. *Purposes* (Tujuan), peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh konsep masyarakat Jepang tentang tujuan (*purposes*) itu sendiri, yang dinamakan *Ikigai*, yang merupakan konsep masyarakat Jepang yang berarti sebuah alasan untuk tujuan. Di mana indikator dari *Ikigai* adalah, *mission* (misi) dan *passion/vocation* (bakat/kemampuan). Dari indikator konsep masyarakat Jepang tentang tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.
2. *Environment* (Lingkungan), peneliti mengambil teori yang dikeluarkan oleh *United States Environmental Protection Agency*, 2011. Yang menyatakan bahwa indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari *changes in ambient conditions* (perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar), dan *change of human health* (perubahan pada kesehatan manusia).
3. *Direction* (Pengarahan), peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh George R. Terry (1986), yang merupakan “usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.” Pada bagian ini terdapat empat indikator pengarah atau *directions*, di antaranya adalah, koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*). Pada *directions* atau pengarah dapat kita ketahui ada empat indikator yang dapat menjadi acuan dari sebuah pengarah.
4. *Action* (Tindakan), pada bagian ini terdapat tiga indikator, di antaranya adalah: *external situation* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan), dan *decission making* (pengambilan keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan erat saat akan melakukan sebuah tindakan.

5. *Learning* (Pembelajaran), pada bagian ini terdapat dua indikator penting, di antaranya adalah: *comparation method* (metode perbandingan), dan *identification* (identifikasi).

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa strategi merupakan rencana yang disusun oleh manajemen puncak (*Top Management*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana ini bisa meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk mempertahankan dan menguatkan eksistensi organisasi dan mampu memenangkan persaingan di luar, namun yang terpenting bagi perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing. Cara berpikir strategis ini tentunya sangat penting bagi sebuah organisasi, karena strategi merupakan langkah awal untuk memahami dan mengimplementasikan strategi tersebut.

2.1.1.1 Tipe-Tipe Strategi

Menurut Rangkuti, pada prinsipnya strategi dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu:

1. Strategi Manajemen Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pembengangan produk, strategi penerapan harga, startegi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya.
2. Strategi Investasi Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.
3. Strategi Bisnis Strategi bisnis ini sering juga di sebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi fungsi kegiatann manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, startegi distribusi, strategi organisasi, dan strategi strategi yang berhubungan dengan keuangan (Scott, 2013:21-22).

Sebagaimana yang Rangkuti kutip dari Scott menyatakan bahwa strategi terbagi menjadi tiga klasifikasi di antaranya, strategi manajemen, strategi investasi, strategi bisnis. Dari klasifikasi yang dibuat oleh Rangkuti yang kemudian dikutip oleh Scott strategi tersebut adalah strategi yang digunakan dalam dunia bisnis pada sebuah perusahaan.

2.1.1.2 Pengelompokan Strategi

Menurut Scott yang dikutip dari Hunger dan Wheelen, apabila strategi yang dibuat oleh organisasi atau instansi fungsional, maka terdapat beberapa strategi yang lebih mengarah kepada rumusan operasional yang harus dilakukan oleh tim dalam suatu perusahaan. Ada beberapa jenis strategi fungsional, yaitu:

1. Strategi produksi: strategi yang berkaitan dengan cara memproduksi suatu barang atau jasa dalam sebuah perusahaan, menempatkan hasil produksi itu ke dalam kriteria produk unggulan, produk kompetitif, produk baru, sesuai dengan kompetensi produk yang dimiliki.
2. Strategi pemasaran dan promosi: strategi pemasaran digunakan untuk menentukan pasar mana yang akan dibidik, kondisi pasar seperti apa yang diinginkan, dan lain sebagainya. Sedangkan strategi promosi adalah strategi untuk menentukan cara peluncuran produk, promosi yang akan dilakukan, dan juga media promosi yang akan dipakai.
3. Strategi keuangan: strategi yang berkaitan dengan pendanaan atau modal yang dipakai dalam proses produksi, pemasaran, promosi, dan kegiatan fungsional lainnya. Strategi keuangan ini menentukan dari mana sumber tersebut didapatkan dan juga cara pendistribusiannya ke pos-pos yang bersangkutan.
4. Strategi SDM (Sumber Daya Manusia): strategi yang menyangkut orang-orang yang melakukan seluruh proses fungsional, mulai dari produksi, pemasaran, promosi, dan hal lain yang menggerakkan perusahaan tersebut.
5. Strategi fungsional lain: hal ini berkaitan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, seperti supplier, konsultan, agen, dan lain-lain (Scott, 2013:25-26).

Dari pengelompokan strategi yang diungkapkan oleh Afriyanti yang dikutip oleh Scott, strategi sendiri dibagi dalam lima kelompok untuk dapat memudahkan strategi apa yang akan dipakai oleh perusahaan atau organisasi agar tepat sasaran untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut.

2.1.1.3 Tahapan Penyusunan Strategi

Tahapan penyusunan strategi pada organisasi pemerintahan terdapat dua macam/model pendekatan, yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Untuk model *top down approach*, proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan lebih diprioritaskan pada pendapat-pendapat level atas yang kemudian diturunkan pada tingkat selanjutnya. Sebaliknya, untuk model *bottom up approach*, level bawah dan menengah menjadi titik awal dari proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan. Adapun beberapa langkah untuk menyusun strategi, adalah:

1. Identifikasi Masalah Sebagai tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode brainstorming atau polling pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada.
2. Pengelompokan Masalah Dari tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.
3. Proses Abstraksi Setelah kelompok masalah terbentuk, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah-masalah krusial dari tiap kelompok. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap masalah tersebut guna mencari faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya.
4. Penentuan Cara Pemecahan Masalah Setelah tahap abstraksi selesai dilakukan, hal berikutnya yang dilakukan adalah menyelesaikan/memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Metode atau cara penyelesaian masalah ini harus konkret dan spesifik.
5. Perencanaan Untuk Implementasi Tahapan untuk menyusun strategi di atas merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan.

Namun hal terpenting dari semua penyusunan tersebut adalah mengimplementasikan seluruh penyusunan strategi yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Nugraha, 2014:21). Nugraha menyatakan bahwa untuk menyusun suatu strategi diperlukan setidaknya lima tahapan yang harus dilakukan, yaitu identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara pemecahan masalah, dan perencanaan untuk implementasi.

2.1.2 Pengertian Golput

Hak politik (political right) adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan hak memilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah- masalah Negara atau pemerintahnya⁸.

Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangan dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu⁹.

Hak-hak politik itu biasanya ditetapkan dan diakui pemenuhannya oleh konstitusi suatu Negara berdasarkan keanggotaannya sebagai warga Negara. Artinya, hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga Negara setempat dan bukan warga asing. Untuk menggunakan hak memilih, seorang warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih, dan untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁸ Mujar ibnu syarif, Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam, Bandung, Angkasa, 2003, hal. 49

⁹ Ibid

1. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam gerakan kontrarevolusi G-30-S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya,
2. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
3. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁰.

Selanjutnya, mengenai golongan putih (golput) merupakan sebuah fenomena yang selalu ramai diperbincangkan setiap kali pemilu. Realitas yang ada membuktikan bahwa disetiap pemilu mulai dari tahun 1955 hingga saat ini dalam pemilihan umum angka pemilih yang tidak sah atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu terus ditemukan. Untuk itu, walaupun golput hanyalah sebuah fenomena dan belum bisa dikategorikan secara akademis, paling tidak pada bab ini penulis ingin menguraikan terlebih dahulu pengertian dan jenis golongan putih atau golput menurut pandangan para pengamat. Sehingga nantinya penulis tidak mengartikan golput itu sendiri.

Golongan putih atau golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya, golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya¹¹.

Dalam literatur perilaku memilih, penjelasan golput merujuk pada perilaku nonvoting. Perilaku nonvoting umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tiadanya motivasi. Di beberapa Negara di dunia ketiga, perilaku nonvoting umumnya termanifestasikan dalam berbagai bentuk.

¹⁰ Ibid, hal. 50

¹¹ Badri Khaeruman, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004, hal. 69

Perilaku tidak memilih seperti ini biasanya dipakai oleh para pemilih sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Bentuk semacam ini juga banyak ditemui di Negara-negara yang menerapkan hukum wajib mencoblos seperti Australia, Belgia, Italia, Brazil dan lain sebagainya¹².

Menurut Rahman Subakti, wakil ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004, menuturkan bahwa golput khusus dialamatkan hanya kepada mereka yang memang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak surat suaranya. Golput harus dilakukan sebagai sebuah kesadaran politik¹³.

Berbeda dengan Rahman Subakti, menurut Indra J. Piliang peneliti dari Centre for strategic and International Studies (CSIS) golput terbagi ke dalam tiga kategori, Pertama, golput ideologis yaitu golput yang disebabkan oleh adanya penolakan terhadap sistem ketatanegaraan. Sebagaimana halnya golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state. Orang yang golput menganggap bahwa pemilu dianggap hanya bagian dari korporasi dari elit-elit politik yang sebenarnya tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Kaum golput semacam ini memandang bahwasannya undang-undang pemilu hanyalah bagian dari rekayasa segelintir orang untuk mencari keuntungan dan kenikmatan.

Kedua, golput pragmatis yaitu golput yang didasarkan oleh perhitungan rasional. Orang golput memandang bahwa pemilihan umum baginya tidak berdampak apa-apa. Golput model ini mirip dengan fardu 'ain dan fardu kifayah dalam hukum Islam, yakni bagi orang yang memilih sudah mewakili keseluruhan, sementara bagi orang yang tidak ikut memilih tidak ada dosa politik kolektif. Orang-orang yang mencari nafkah dan orang-orang yang tidak hadir pada hari pemilihan dengan berbagai macam alasan termasuk dalam golput model ini. Sikap mereka setengah-setengah memandang pemilu, antara percaya dengan tidak.

¹² Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, Surabaya, Jawa Pos Press, 2004, hal. 24-241

¹³ <http://p4ndu3121990.wordpress.com/2008/08/13/mengapa-golput>, diakses pada tgl 09-11-2014

Ketiga, golput politis yaitu golput yang disebabkan oleh faktor-faktor politik. Contoh gus dur menyatakan dirinya golput akibat putusan KPU dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memutuskan bahwa ia tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden. Juga golput yang dilakukan oleh pendukung fanatic pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah dalam putaran pertama. Tapi sebenarnya kelompok ini masih percaya kepada Negara dan juga percaya pada pemilu. Hanya saja akibat preferensi politiknya berubah atau sistemnya secara sebagian juga merugikan mereka¹⁴.

Sementara menurut Arief Budiman, sosiolog dan pengajar di Universitas Melbourne, Australia, menggolongkan golput kepada tiga macam. Pertama, golput yang disebabkan oleh karena alasan politik, umpamanya golput akibat dari protes terhadap undang-undang pemilu yang dianggapnya tidak jujur, tidak adil dan tidak demokratis atau semua calon yang ada menurutnya tidak layak. Kedua, golput karena memang benar-benar apatis terhadap pemilu. Baginya urusan politik adalah urusan elit-elit politik, politik di Indonesia dianggapnya sangat elitis, dampak dari pemilu tidak akan berguna bagi masyarakat, karena para elit hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ketiga, golput karena kecelakaan. Banyak orang yang tidak memahami aturan pemilu, sehingga tata cara pencoblosan yang benar tidak mereka ketahui misalnya tidak boleh mencoblos di luar gambar atau mencoblos lebih dari satu¹⁵.

2.1.2.1 Sejarah Munculnya GOLPUT di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Pemilu 1955 adalah pemilu yang dianggap paling demokratis pertama kali diadakan di Indonesia. Pada saat itu rakyat bergairah untuk berperan serta dalam mensukseskan pemilu tersebut.

¹⁴ Indra J. Piliang, Golput dan Masyarakat Baru Indonesia, artikel diakses pada tgl 09 – 11 – 2014 dari <http://64.203.71/kompas-cetak/04/07/08/opini/1163352.htm>

¹⁵ Arief Budiman, Golput, Gejala dan Masa Depan, artikel diakses pada <http://majalah-tempointraktif.com/id/arsif/2004/07/19/kl/mbm/20040719.KL93851id.html> diakses pada tgl 10-11-2014

Kemungkinan pada saat itu belum ada fenomena golongan putih (golput) walaupun mungkin ada tidak terdengar suaranya. Kira-kira sekitar 91,54% dari jumlah rakyat pemilih terdaftar ikut menyampaikan suaranya dalam pemilihan anggota DPR dan sekitar 90% dari rakyat pemilih terdaftar ikut menyampaikan suaranya dalam pemilihan anggota dewan konstituante¹⁶.

Golput muncul pada awal tahun 1970-an, sebagai reaksi terhadap segala kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, pada saat menjelang pemilu tahun 1971. Para pelopor golput adalah para aktivis angkatan 66 diantaranya Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Julius Usman, Imam Waluyo, dan juga Adnan Buyung Nasution. Yang kemudia gerakan ini mendapatkan dukungan dari berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang serta Solo¹⁷.

Menurut Harian Kami terbitan tanggal 4 Juni 1971, golput lahir di Balai Budaya Jakarta dengan menyatakan tidak akan memilih salah satu tanda gambar peserta pemilu waktu itu. Gerakan ini memperoleh dukungan dari beberapa dewan mahasiswa dan senat mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, terutama di Jawa¹⁸.

2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku GOLPUT

Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput / nonvoting pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan perilaku pemilih diatas. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelley (1975), Burnham (1987), Powell (1986) dan Downs (1957), Moon menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik:

¹⁶ Priambudi Sulistiyanto, Politik Golput di Indonesia Kasus Peristiwa Yogya, Yogyakarta: Lekhat, 1994, hal. iv

¹⁷ Ibid, hal. 2

¹⁸ "Golongan Putih" dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 6, Jakarta: PT. Delta Pameungkas, 2004, hal. 197

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran memilih.

2. Faktor Psikologis

Penjelasan nonvoting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

3. Faktor Rasional

Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson (1971) dan Down (1957) , “ tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka . Pertanyaannya yang akan diajukan individu yang rasional ketika mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi adalah : „ Apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya? „, dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan , jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.”ini adalah skenario “ free rider “ (pengguna layanan publik yang tidak mau memenuhi kewajibannya) ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling rasional . Hal ini menjadikan olson sampai pada kesimpulan bahwa, individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum dan kelompok.

2.1.2.3 Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Anggota ahlul al-aqdi wa al-hal (parlemen) mengadakan siding untuk memilih imam, mereka mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak pembaiatannya. Jika diantara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, ahlul al-aqdi wa al-hal menawarkan jabatan imam kepadanya. Jika ia bersedia menjadi imam, maka mereka segera mengangkatnya.

Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi imam yang sah, kemudian seluruh umat harus membaitanya dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak untuk dijadikan imam dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam, karena imamah adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan imam diberikan kepada orang yang layak menerimanya.

2.1.3 PEMILUKADA Deli Serdang

Pemilihan umum Bupati Deli Serdang 2014 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Deli Serdang periode 2024-2029. Pemilihan Bupati (PILBUP) Deli Serdang tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (PILPRES) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (PILEG), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sebanyak 1.439.399 orang. Dari jumlah itu, 728.492 di antaranya merupakan pemilih perempuan dan sisanya, 710.907 orang adalah pemilih laki-laki. jumlah pemilih tersebut berasal dari 22 kecamatan dan 394 desa/kelurahan di Deli Serdang. Dalam proses pemilihannya nanti juga akan disiapkan 2.780 tempat pemungutan suara atau TPS.

Tabel 2. 1 Data Pemilih Tetap

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	GUNUNG MERIAH	12	12	1.081	1.172	2.253
2	TANJUNG MORAWA	26	301	82.482	84.622	167.104
3	SIBOLANGIT	30	63	7.588	8.146	15.734
4	KUTALIMBARU	14	67	13.490	14.546	28.036
5	PANCUR BATU	25	136	34.989	36.534	71.523
6	NAMORAMBE	36	71	14.408	15.404	29.812
7	BIRU-BIRU	17	53	13.766	14.641	28.407
8	STM HILIR	15	60	12.145	12.657	24.802
9	BANGUN PURBA	24	50	8.690	8.958	17.648
10	GALANG	29	103	24.841	26.302	51.143
11	STM HULU	20	31	5.132	5.398	10.530
12	PATUMBAK	8	134	35.517	36.392	71.909
13	DELI TUA	6	83	21.490	21.957	43.447
14	SUNGGAL	17	326	89.645	90.939	180.584
15	HAMPARAN PERAK	20	224	62.417	61.723	124.140
16	LABUHAN DELI	5	95	24.222	24.410	48.632
17	PERCUT SEI TUAN	20	532	145.215	148.951	294.166
18	BATANG KUIS	11	90	24.973	25.257	50.230
19	LUBUK PAKAM	13	121	32.909	33.971	66.880
20	PAGAR MERBAU	16	60	14.543	14.923	29.466
21	PANTAI LABU	19	78	18.633	18.324	36.957
22	BERINGIN	11	90	22.731	23.265	45.996
TOTAL		394	2780	710.907	728.492	1.439.399

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Strategi Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Kota Bekasi 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Alya Septianingrum, dan Ainur Roefiq meneliti terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah menyusun dan menyiapkan strategi untuk mengurangi angka golput pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024. Pada pilkada sebelumnya masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan partisipasi masyarakat belum mencapai target nasional yaitu 77,5%. Untuk itu KPU Kota Bekasi menyusun strategi agar Pilkada di tahun 2024 angka golput menjadi rendah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi KPU dalam mengurangi angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bekasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif yang disertai dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi, serta pengambilan informan dengan purposive sampling.

Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi KPU dalam mengurangi angka golput pada Pilkada Tahun 2024 sudah sesuai dengan strategi yang

dikehendaki yang terdiri dari sasaran, kebijakan serta rencana yang ingin diwujudkan. Berdasarkan strategi yang direalisasikan KPU Kota Bekasi sudah merealisasikan beberapa kegiatan, salah satunya dengan menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya berpartisipasi menggunakan hak suara mereka dalam Pilkada tahun 2024.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Aini Anisa Nur dkk membahas tentang KPU adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu tetap, mandiri, dan nasional. Sistem pemilihan 2024 dimaksudkan untuk menjadi lebih transparan dan demokratis dengan daftar calon yang dapat diakses publik. Menurut data yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, 8.000 pemilih pemula mengikuti pemilihan umum di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024. Menurut data yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dari total daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024, sekitar 15% dari pemilih tersebut memilih untuk golput. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan mengurangi angka golput pada pemilu tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Studi menunjukkan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang Pasal 6 Tentang Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum memenuhi syarat untuk strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput pada pemilu tahun 2024.

3. Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Penelitian yang dilakukan oleh Syafira Dini Asmarani dkk membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia selalu melibatkan peristiwa pemilih kulit putih atau yang sering disebut “Golput”, perilaku seperti ini di kalangan Masyarakat mempunyai kelebihan dan kekurangan karena dianggap akan berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Definisi mendasar mengenai Golput merupakan perbuatan yang tak mempergunakan kebebasan memilih dalam pelaksanaan pemilu dikarenakan bermacam aspek dan argumentasi. Ketidakpuasan warga kepada Lembaga politik dianggap tidak setara dalam pengambilan putusan menjadi akar penyebab meningkatnya perilaku tidak memilih (Golput) dalam pemilu. Menurut data KPU (Komisi Pemilihan Umum) masih banyak menunjukkan jumlah angka Golput yang masih tergolong tinggi di kalangan Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu rencana atau strategi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu, dengan cara memperluas pemahaman dan pembelajaran terhadap seluruh warga mengenai pentingnya memilih sebagai kewajiban yang harus dipenuhi atau dijalankan oleh seluruh Masyarakat.

Dalam hal ini tidak ada hukuman bagi Tindakan Golput yang ditemukan dalam Undang-Undang, orang-orang yang menghasut atau mendorong Masyarakat lain untuk tidak mempergunakan hak untuk memilihnya adalah orang yang akan mempunyai peluang atau menerima hukuman atas perbuatannya tersebut.

4. Sosialisasi Pemilu 2024 Tentang Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Golput di Kesiman Petilan

Penelitian ini membahas pengabdian masyarakat dalam menekan angka Golput di Desa Kesiman Petilan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih pemimpin melalui pemungutan suara setiap 5 tahun sekali. Pemilu berkualitas menciptakan partisipasi aktif dari rakyat, persaingan yang adil, dan representasi yang akurat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu berkualitas untuk melahirkan pemimpin masa depan. Metode yang digunakan adalah metode partisipasi aktif yaitu

sosialisasi mulai dari penyampaian materi mengenai tata cara mengetahui data pemilih tetap online, sosialisasi Lokasi TPS, penyampaian materi 5 surat suara, dan memperlihatkan specimen, hingga memberikan kata persuasive agar masyarakat datang dan mencoblos.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya pengenalan dan pembekalan KKN, diskusi bersama tim KPPS, pembuatan brosur, dan sosialisasi kepada masyarakat Kesiman Petilan. Dalam kegiatan sosialisasi tentang pemilu kepada masyarakat Kesiman Petilan yang dilaksanakan di Balai Banjar. Ada beberapa materi yang disampaikan pada saat sosialisasi, diantaranya: 1. Tata cara mencoblos, 2. Tata cara cek DPT (Daftar Pemilih Tetap) Online, 3. Mengenali 5 jenis surat suara.

Tujuan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dan menyukseskan pemilu 2024. Hasil dari pengabdian ini adalah peran masyarakat sangat penting dalam proses pemilu untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia sehingga mengenai hak suara yang harus disuarakan melalui pemungutan suara. Disatu sisi masyarakat sangat antusias untuk melakukan pemilihan dikarenakan 1 suara sangat berarti untuk kelangsungan hidup selama 5 tahun kedepan.

5. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk Mengurangi Angka Golput pada Pilkada Tahun 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Septi ini bertujuan untuk membahas terkait Upaya KPU Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada PILKADA tahun 2024. Masih banyak Masyarakat kabupaten kepahiang yang tidak melakukan hak pilihnya dengan berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan PILKADA tahun 2020, sebanyak 19% yang tidak menggunakan hak pilihnya.

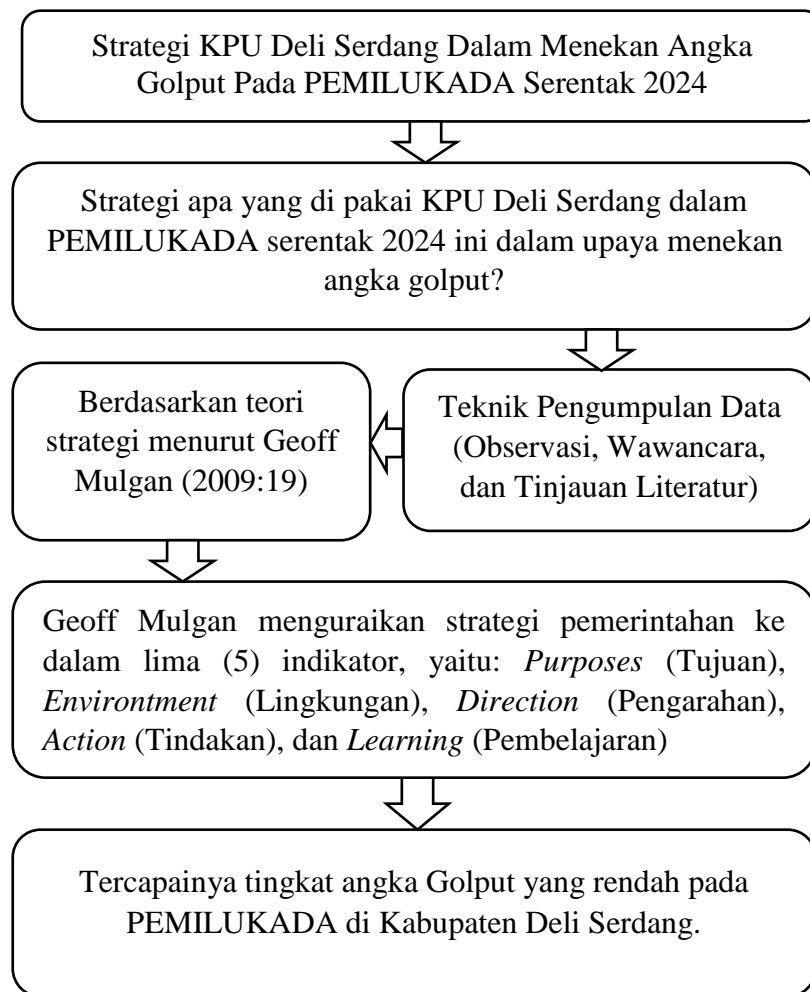
Tujuan penelitian ini agar semua Masyarakat Kepahiang Menggunakan hak pilihnya pada PILKADA yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sehingga diharapkan pemilihan untuk mengetahui wewenang dan Upaya KPU Kabupaten Kepahiang dalam menekan angka Golput, dan untuk mengetahui kajian fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Golput. Jenis Penelitian

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, dengan Sifat Penelitian deskriptif Kualitatif.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) Undang-Undang, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Fiqih *Approach* (*Siyasah Dusturiyah*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut; pertama, Upaya yang dilakukan KPU kabupaten kepahiang untuk mengurangi angka golput pada PILKADA tahun 2024, telah melakukan upaya dengan semaksimal mungkin seperti sosialisasi kepada masyarakat mensosialisasikan dengan menggunakan media sosial dengan cara ini berharap agar masyarakat tidak melakukan golput lagi dan masi banyak masyarakat melakukan money politics. Kedua Kajian fiqh siyasah dusturiyyah terkait dengan Golput dalam pandangan imam Al-Ghozali adalah larangan untuk melakukan Golput. Hal tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat59 dan kaidah fiqh siyasah Kata Kunci: Upaya KPU, Angka Golput, Pilkada.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah Penulis jabarkan diatas maka untuk menekan angka Golput dalam kontestasi PEMILUKADA serentak 2024 di Kabupaten Deli Serdang dengan ini KPU harus memiliki strategis khusus. Strategi yang dilakukan KPU diharapkan mampu menekan angka Golput. Untuk menggambarkan alur penelitian ini maka Peneliti membuat kerangka berpikir seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir